

Peran G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global Pasca Covid-19: Analisis Kebijakan Penangguhan Pembayaran Utang

Yanuar Rahmadan & Rorina Sabrina
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
yanuar.rahmadan@uta45jakarta.ac.id; rorinasbr2609@gmail.com

DOI: 10.32699/resolusi.v7i2.8195

Submitted: 2024-11-13, Revised: 2024-12-23, Accepted: 2024-12-30

Abstrak

Pandemi Covid – 19 membuat banyak negara di dunia mengalami perlambatan perekonomian, terutama negara-negara yang masuk ke dalam kategori negara rentan dan rapuh (vulnerable and fragile countries). G20 sebagai salah satu forum antarpemerintah didorong oleh International Monetary Fund dan World Bank untuk ikut memainkan peranan penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Langkah yang diambil berupa program Debt Service Suspension Initiative (penundaan pembayaran layanan utang) yang ditujukan bagi negara- negara yang masuk ke dalam kategori negara rentan dan rapuh tersebut. Tujuannya untuk memberikan keringanan beban finansial negara tersebut selama menghadapi pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tinjauan literatur. Angola, Pakistan dan Somalia diambil sebagai tiga negara penerima penundaan pembayaran layanan utang terbesar berdasarkan data dari World Bank. Teori rezim internasional digunakan untuk menganalisis peran G20 terkait pemberian penundaan pembayaran layanan utang tersebut. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa penundaan pembayaran layanan utang telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Angola dan Somalia. Selain itu, G20 sebagai sebuah rezim internasional telah mengikuti prinsip yang diakuinya serta memiliki aturan dan prosedur yang berkaitan dengan pemberian penundaan pembayaran layanan utang melalui G20 Action Plan. G20 juga mengakui adanya interdependensi secara makro ekonomi global, sehingga G20 merasa perlu untuk membuat kebijakan penundaan pembayaran layanan utang kepada negara-negara dalam kategori rentan dan rapuh tersebut.

Kata kunci: *penundaan pembayaran layanan utang, G20, rezim internasional*

Abstract

Covid-19 pandemic has caused countries to experience economic downturn, especially countries that are categorized as vulnerable and fragile. The G20, as one of the intergovernmental forums, was encouraged by the International Monetary Fund and World Bank to take part in the economic recovery effort. The Debt Service Suspension Initiative program (DSSI) is taken, aimed at countries that are categorized as vulnerable and fragile. DSSI is aimed to provide debt relief to ease financial burden from the countries during the Covid-19 pandemic. This research uses a qualitative research method, exploring the issue through literature review. Angola, Pakistan and Somalia as the three countries that received the largest debt suspension based on World Bank data are used as the sample. The international regime theory is also used to analyze the role of G20 in providing debt service suspension. The result from the study is that the debt service suspension has positively impact Angola and Somalia. G20, as an international regime has also followed the principles it recognizes since its establishment and has set

of rules and procedures related to the debt suspension initiative through the G20 Action Plan. In addition, G20 also acknowledges the existence of global macroeconomic interdependence, hence G20 established DSSI for countries in the vulnerable and fragile categories.

Keywords : *debt service suspension initiative, G20, international regime*

Pendahuluan

Wabah *Covid-19* telah menyebabkan pandemi global sejak November tahun 2019 yang tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan bagi dunia, namun juga mengakibatkan perekonomian dunia mengalami perlambatan. Negara-negara berupaya untuk melakukan kerangka kerja sama di tengah pandemi *Covid-19*. Hal ini dikarenakan pandemi *Covid-19* tidak hanya memberikan dampak pada negara Tiongkok saja, tetapi negara lain seperti negara anggota G7 -yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat, yang ikut mengalami resesi ekonomi. Melihat krisis perekonomian yang semakin berkembang, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa perekonomian akan menyusut pada tahun 2020 (Wikanto, 2020).

Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang terkuat juga terkena dampak dari adanya pandemi *Covid-19*. Tercatat pada kuartal I 2020, Amerika Serikat mengalami penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5 persen, yang berlanjut pada kuartal II 2020 turun sebesar 32,9 persen (Bureau of Economic Analysis, 2020). Berdasarkan data dari Bank Dunia, Jerman juga mengalami penurunan PDB sebesar 3,8 persen pada tahun 2020 (World Bank, 2023). Inggris mengalami penurunan PDB pada tahun 2020 sebesar 10,4 persen (World Bank, 2023a). Selain itu, Badan Statistik Nasional Inggris (Office for National Statistics) juga melaporkan penurunan PDB Inggris pada kuartal IV 2020 sebesar 6,6 persen bila dibandingkan dengan kuartal IV 2019 (Office for National Statistics, 2021). Perancis juga mengalami penurunan PDB sebesar 7,5 persen pada tahun 2020 (World Bank, 2023b). Sejalan dengan data tersebut, Institut Nasional Statistik dan Studi Ekonomi Perancis mengeluarkan data penurunan PDB sebesar 7,9 persen di tahun 2020 dengan sektor yang paling terdampak yakni sektor perdagangan dan jasa penyedia transportasi, akomodasi dan makanan (Baleyte et al., 2021).

Penurunan PDB juga dialami negara berkembang seperti Filipina yang mengalami penurunan PDB pada kuartal II sebesar 16,5 persen (Arianto, 2021). Selain itu, Turkiye mengalami penurunan PDB sekitar 4 persen pada tahun 2020 dengan tingkat pengangguran sebesar 12,8 persen (Arianto, 2021). Brazil juga mengalami penurunan PDB sebesar 11,4 persen dan tingkat konsumsi rumah tangga yang turun 12,5 persen (Arianto, 2021). Korea Selatan juga mengalami penurunan PDB pada kuartal II 2020 sebesar 3,3 persen (Arianto, 2021).

Memburuknya isu krisis perekonomian yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* membuat negara-negara yang tergabung ke dalam G20 mengambil berbagai langkah fisikal dan moneter yang bertujuan untuk mendukung perekonomian dan ketahanan sistem keuangan (Astuti, 2020). Negara-negara G20 melakukan pertemuan pertama secara daring pada 26 Maret 2020 yang berfokus pada krisis kesehatan *Covid-19*. Hasil dari pertemuan ini

yakni memunculkan komitmen untuk memberikan alat-alat medis untuk mendukung sistem kesehatan global (World Health Organization, 2021).

Negara-negara G20 melakukan pertemuan kembali secara daring yang dilaksanakan pada 21-22 November 2020 di Riyadh. Pertemuan ini disebut sebagai *G20 Extraordinary Leader Summit*, dihadiri oleh beberapa kepala negara G20, negara-negara undangan, organisasi regional dan multilateral. Hasil dari pertemuan ini yakni komitmen dari negara-negara G20 untuk melindungi nyawa manusia, melindungi pekerjaan dan pendapatan masyarakat, memulihkan kepercayaan, menjaga stabilitas keuangan, mengembalikan pertumbuhan dan memulihkan ekonomi dengan lebih kuat, meminimalisir hambatan perdagangan dan rantai pasok global, memberikan bantuan kepada seluruh negara yang membutuhkan, dan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan kesehatan publik dan kebijakan keuangan (G20 Information Centre, 2020). Pemimpin KTT G20 juga mendeklarasikan penanganan krisis pandemi yang berfokus pada mobilisasi sumber daya untuk menangani kebutuhan pembiayaan secara segera dalam penanganan kesehatan global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020). Selain itu, G20 juga mendukung upaya kolaboratif, terutama inisiatif ACT-A dan fasilitas COVAX, serta pemberi lisensi sukarela atas kekayaan intelektual, memberikan dukungan fiskal yang difokuskan pada peningkatan sistem kesehatan, perlindungan sosial, peningkatan lapangan kerja, dan dukungan dunia usaha (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020).

Selain fokus pada penanganan pandemi Covid-19, G20 juga melakukan pertemuan KTT G20 di Bali pada 1 September 2022 untuk memperdalam diskusi mengenai kebijakan-kebijakan terkait pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* dan literasi digital. Sejalan dengan tema yang diangkat yaitu "*Recover Together, Recover Stronger*", terdapat empat poin penting yang bisa dirangkum yakni dibutuhkannya penguatan arsitektur kesehatan global melalui terbentuknya dana pandemi senilai lebih dari USD 1,5 miliar dari negara anggota dan non anggota G20 serta tiga lembaga filantropi; aksi nyata untuk transisi energi yang berkelanjutan melalui perolehan Komitmen Energy Transition Mechanism dari Just Energy Programme sebesar USD 20 miliar; tersedianya *Resilience and Sustainability Trust* oleh IMF yang diperuntukkan kepada anggota IMF melalui skema *Special Drawing Right (SDR)* bagi negara rentan dan miskin sejumlah USD 81,6 miliar, serta adanya komitmen peningkatan aksi perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim melalui pembentukan *Climate Sustainability Working Group* (Putra, 2022).

Sebelumnya, pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 yang dilakukan secara daring pada 15-16 April 2020, dibahas berbagai langkah untuk merespon krisis perekonomian. Pertemuan tersebut menghasilkan kebijakan layanan penundaan pembayaran layanan utang (*Debt Service Suspension Initiative*) untuk negara-negara yang berpenghasilan rendah (Astuti, 2020). Kebijakan penundaan pembayaran layanan utang tersebut dihasilkan setelah dilakukannya pengamatan atas tingkat perekonomian di negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah yang mengalami perburukan kondisi perekonomian dan beberapa negara mengalami kesulitan untuk membayar utang akibat pandemi Covid-19 (Astuti, 2020).

DSSI sendiri hadir dari inisiasi Bank Dunia dan IMF yang mendorong negara-negara G20 untuk membantu memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk memerangi pandemi

dan melindungi kehidupan dan penghidupan jutaan orang yang paling rentan di negara-negara berkembang dan miskin (World Bank, 2022). Total 48 dari 73 negara yang memenuhi syarat ikut dalam program penundaan pembayaran layanan utang, di mana selama periode Mei 2020 hingga Desember 2021 telah dilakukan penundaan pembayaran layanan utang sejumlah USD 12,9 miliar (World Bank, 2022). Tiga negara terbesar yang mendapatkan penundaan pembayaran layanan utang melalui skema DSSI ini yakni Angola, Pakistan, dan Somalia.

Beberapa penelitian terkait peran G20 dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di antaranya membahas tentang keterbatasan dari negara-negara berkembang untuk melakukan respon fiskal besar-besaran, baik untuk mencegah penyebaran Covid-19, untuk mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan maupun pekerja di negara tersebut hingga pemulihan ekonomi dapat dilakukan (McKibbin dan Vines, 2020). Sehingga, diperlukannya kerja sama internasional di antara negara-negara berkembang di karenakan adanya keleluasaan yang lebih bagi negara-negara maju untuk bisa melakukan respon fiskal bagi ekonomi domestiknya. Tindakan kolektif yang terkoordinasi oleh semua lembaga internasional utama juga dinilai terlambat dan tidak memadai. Salah satu alasan utama dari keterlambatan ini yakni adanya perpecahan dan ketegangan politik yang terjadi dalam politik internasional seperti di G20, BRICS, maupun organisasi internasional lainnya (Larionova dan Kirton, 2020).

Penelitian terkait efektivitas penundaan pembayaran layanan utang memberikan keuntungan bagi negara-negara rentan, terutama akibat adanya ketidakmampuan dari sektor swasta dalam menanggapi pandemi Covid-19 (Merling dan Cashman, 2023). Meskipun demikian, penundaan pembayaran layanan utang hanya menciptakan ruang fiskal sementara dan negara-negara rentan tetap harus terus membayar sisanya di kemudian hari (Merling dan Cashman, 2023). Selain itu, munculnya kritik atas aspek sukarela penundaan pembayaran layanan utang ini di mana hanya menguntungkan kreditor tertentu dan penyerahannya dilakukan dengan persyaratan yang mahal dan jauh lebih sedikit dari yang dibutuhkan (Laskaridis, 2021).

Penelitian lainnya melalui metode menggunakan wawancara dan kunjungan lapangan di Angola, Kenya, dan Zambia memberikan hasil bahwa penundaan pembayaran layanan utang telah berhasil diimplementasikan dan menyediakan saluran bagi Tiongkok sebagai salah satu kreditor bilateral terbesar di dunia untuk melakukan perundingan terkait penanganan utang bersama dengan Paris Club dalam konteks bantuan neraca pembayaran IMF (Bräutigam dan Huang, 2023). Dalam Working Paper terkait 24 restrukturisasi utang negara di bawah G20 Common Framework, disimpulkan bahwa penundaan pembayaran layanan utang telah menjaga ekonomi Zambia selama lebih dari 3,5 tahun (Grigorian dan Bhayana, 2024).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ingin bertujuan untuk melihat bagaimana peran G20 dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19 terkait penundaan pembayaran layanan utang di ketiga negara yakni Angola, Pakistan dan Somalia. Selain itu, penelitian ini akan memberikan deskripsi terkait penundaan pembayaran layanan utang di ketiga negara tersebut. Penelitian ini penting berangkat dari data yang menyebutkan bahwa sekitar 60 persen negara berpendapatan rendah berisiko tinggi atau sudah terlilit utang akibat

pandemi Covid-19 (Goergieva dan Pazarbasioglu, 2021). Pada tahun 2015, angka tersebut di bawah 30 persen (Goergieva dan Pazarbasioglu, 2021). Sehingga, penelitian ini penting untuk menjawab peran G20 sebagai salah satu forum antarpemerintah terbesar dalam pemulihan pasca Covid-19. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah penundaan pembayaran layanan utang memberikan dampak yang positif bagi negara penerima.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berangkat dari fenomena yang terjadi, sejalan dengan definisi dari Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln tentang penelitian kualitatif (Snape and Spencer, 2003):

“Penelitian kualitatif adalah kegiatan yang menempatkan pengamat di dunia. Penelitian ini terdiri dari serangkaian interpretasi, praktik material yang membuat dunia terlihat (...), penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap dunia. Ini berarti bahwa peneliti kualitatif mempelajari berbagai hal dalam lingkungan alami mereka, mencoba memahami, atau menafsirkan, fenomena dalam hal makna yang diberikan orang kepada mereka.”

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode yang bisa dilakukan, di antaranya metode observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok, narasi, dan analisis bukti dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis dokumen berupa tinjauan literatur (*literature review*) yang secara umum dapat digambarkan sebagai cara yang lebih atau kurang sistematis untuk mengumpulkan dan mensintesis penelitian sebelumnya, dengan memadukan temuan dan perspektif dari banyak temuan empiris, dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh studi tunggal (Snyder, 2019). Tinjauan literatur dapat digunakan, misalnya, untuk membuat agenda penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian, atau sekadar membahas masalah tertentu (Snyder, 2019).

Metode tinjauan literatur yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa *systematic review*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi semua bukti empiris yang sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis tertentu (Snyder, 2019). Artinya, proses peninjauan sistematis digunakan untuk mengumpulkan artikel, dan kemudian pendekatan kualitatif digunakan untuk dilakukan penilaian (Snyder, 2019). Dalam prosesnya, penelitian ini memiliki empat tahapan yang dilakukan: yang pertama yakni melakukan rencana desain tinjauan literatur di mana metode tinjauan literatur berupa *systematic review* dipilih. Pertimbangan pemilihan metode ini dikarenakan dapat menemukan tingkat studi atau karakteristik sampel mana yang memiliki pengaruh terhadap fenomena yang sedang dipelajari -pemberian penundaan pembayaran layanan utang pada masa Covid-19, seperti apakah studi yang dilakukan dalam satu konteks budaya menunjukkan hasil yang secara signifikan berbeda dari studi yang dilakukan dalam konteks budaya lain. Konteks budaya ini berupa kondisi pandemi Covid-19 di mana kondisi yang tidak lazim.

Tahapan yang kedua yakni melakukan tinjauan literatur di mana penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yang berasal dari data statistik, artikel jurnal, artikel berita dan buku. Sumber data statistik yang digunakan data Badan Pusat Statistik Inggris dan Perancis yang berfungsi sebagai data penurunan GDP dari negara-negara di dunia saat terjadinya pandemi Covid-19. Selain itu, data dari Bank Dunia juga diambil sebagai sumber utama dalam penentuan sampel pada penelitian ini untuk menentukan negara penerima penundaan pembayaran layanan utang terbesar. Data berupa artikel jurnal dan artikel berita digunakan sebagai rujukan berita yang membahas tentang penundaan pembayaran layanan utang dan berita terkait pemberian layanan utang kepada negara yang dijadikan sampel penelitian. Tahapan yang ketiga yakni dengan melakukan analisis atas temuan dari data sekunder, artikel jurnal dan artikel berita. Data kuantitatif dilakukan elaborasi dalam bentuk tabel dan kemudian diinterpretasi. Data yang ditemukan dan digunakan kemudian dilakukan analisis tinjauan literatur dengan menggunakan konsep rezim internasional untuk menjawab rumusan masalah.

Kerangka Konseptual

Pembahasan mengenai analisis rezim pada mulanya diperuntukan untuk menunjukkan bahwa institusi merupakan unsur penting dari teori politik dunia apa pun, di mana hal ini bertentangan dengan teori/perspektif neorealis yang lebih mengedepankan kompetisi (Levy, Young and Zürn, 1995). Rezim internasional didefinisikan sebagai prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan yang menjadi titik temu antara ekspektasi para aktor pada suatu area isu tertentu (Krasner, 1982). Prinsip didefinisikan sebagai keyakinan akan fakta, sebab akibat, dan kebenaran (Krasner, 1982). Norma didefinisikan sebagai standar perilaku yang ditetapkan dalam hal hak dan kewajiban (Krasner, 1982). Aturan didefinisikan sebagai resep atau larangan khusus untuk bertindak (Krasner, 1982). Prosedur pengambilan keputusan didefinisikan sebagai praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif (Krasner, 1982). Fokus yang mendasari definisi rezim internasional dari Krasner bahwa rezim internasional sebagai tempat bertemunya ekspektasi, dan kepentingan nasional, dari para aktor (negara). Selain itu, rezim internasional juga terdiri atas prinsip, norma, aturan dan prosedur.

Sedangkan, Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye berfokus pada kehadiran interdependensi atau ketergantungan dari para aktor (negara). Keohane dan Nye (2021) mendefinisikan rezim internasional sebagai:

“Ketergantungan mempengaruhi politik dunia dan perilaku negara; tetapi tindakan pemerintah juga mempengaruhi pola saling ketergantungan. Dengan membuat atau menerima prosedur, aturan, atau lembaga untuk jenis kegiatan tertentu, pemerintah mengatur dan mengendalikan hubungan transnasional dan antarnegara.”

Sehingga, berdasarkan dua definisi yang telah diberikan bisa dilihat dua operasionalisasi yang akan melandasi pembahasan yakni rezim internasional sebagai tempat bertemunya kepentingan nasional negara dan terdiri atas sekumpulan prinsip, norma, aturan dan

prosedur; serta negara sebagai aktor utama (pemerintah) saling bergantung dan mempengaruhi.

Ketertarikan pada rezim internasional muncul dari adanya ketidakpuasan terhadap konsepsi dominan tentang tatanan, otoritas, dan organisasi internasional (Haggard and Simmons, 1987). Adanya kontras tajam antara kompetitif, "anarki" dalam sistem *zero-sum* dalam hubungan antarnegara, serta "otoritas" dalam politik domestik terlihat membesar-besarkan dalam menjelaskan perilaku kooperatif atau kerja sama di antara negara-negara industri maju (Haggard and Simmons, 1987). Munculnya dilema kebijakan yang muncul dari hasil adanya saling ketergantungan di antara negara-negara di dunia sejak Perang Dunia II menghasilkan bentuk-bentuk koordinasi dan organisasi baru yang tidak sesuai dengan kerangka perspektif realis (Haggard and Simmons, 1987). Analisis rezim berasumsi bahwa pola tindakan negara dipengaruhi oleh norma, tetapi perilaku yang diatur oleh norma tersebut sepenuhnya konsisten dengan upaya negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing (Haggard and Simmons, 1987).

Negara-negara dengan *power* besar menaruh perhatian serius dengan rezim internasional di mana melalui rezim internasional dapat memungkinkan munculnya fokus tujuan baru di mana aturan dan harapan dapat bertemu, sehingga negara-negara dengan *power* besar dapat menggunakan kemampuan ideasional dan material untuk menciptakan gagasan kepada aktor-aktor lain tentang tujuan mereka (Drezner, 2009). Sehingga melalui hal ini dapat dilihat bagaimana negara-negara dengan *power* yang lebih besar menggunakan rezim internasional, salah satunya, untuk mempengaruhi negara-negara yang lebih lemah dan untuk mencapai kepentingannya.

Hasil dan Diskusi

Terdapat total 48 negara dari 73 negara yang memenuhi syarat ikut dalam skema DSSI, di mana tiga negara penerima penundaan pembayaran layanan utang terbesar dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar tiga negara yang mendapatkan layanan DSSI terbesar

Negara Penerima Layanan DSSI	Negara Anggota G20 yang Memberikan Layanan DSSI*	Jumlah Utang	Total Penundaan Layanan DSSI†
Angola	Tiongkok	USD 65,39 miliar‡	USD 507,1 juta
	Jepang		
	Kanada		
	Amerika Serikat		
Pakistan	Kanada	USD 118,05 miliar§	USD 1,6566 miliar
	Tiongkok		
	Perancis		

* World Bank. *Debt Service Suspension Initiative (DSSI)*. <https://www.worldbank.org/en/programs/debt-statistics/annual-presentation>

† World Bank. (2022). *Debt Service Suspension Initiative*.

<https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative>

‡ World Bank. *External debt stocks, total (DOD, current US\$)-Angola*.

<https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?end=2022&locations=AO&start=2015>

§ World Bank. *External debt stocks, total (DOD, current US\$)-Pakistan*.

<https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?end=2022&locations=PK&start=2015>

	Jerman		
	Italia		
	Jepang		
	Korea Selatan		
	Arab Saudi		
	Inggris		
	Amerika Serikat		
Somalia	Perancis	USD 4,66 miliar**	USD 928,7 juta
	Inggris		
	Amerika Serikat		

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa Angola menjadi negara penerima layanan penundaan pembayaran layanan utang (DSSI) dari negara anggota G20 dengan jumlah penundaan pembayaran layanan utang sejumlah USD 507,1 miliar, diikuti oleh Pakistan yang mendapat penundaan sejumlah USD 1,66 miliar, diikuti oleh Somalia dengan penundaan sejumlah USD 928,7 miliar.

Penundaan Pembayaran Layanan Utang di Angola

Selama mengalami penurunan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, Angola mendapatkan penundaan pembayaran layanan utang dari Tiongkok selaku negara anggota G20. Jumlah utang luar negeri Angola yang telah dipinjam dari Tiongkok sejak tahun 2002 sejumlah USD 45 miliar, dengan persentase 40 persen dari keseluruhan utang Angola (ADF, 2024). Angola cukup bergantung pada utang dari Tiongkok, salah satunya, dikarenakan nilai *credit rating* dari negara Angola yakni CCC sehingga menyebabkan Angola kesulitan mendapatkan pendanaan lainnya dikarenakan munculnya kekhawatiran potensi kegagalan pembayaran utang (Fitch Rating, 2024).

G20 dan pemerintah Angola melakukan negosiasi terkait penundaan pembayaran layanan utang yang dilaksanakan pada bulan Juni 2020, di mana menghasilkan kesepakatan awal yaitu terkait penundaan pembayaran layanan utang yang diberikan oleh China Eximbank pada periode bulan September 2020. Angola menerima keringanan utang setidaknya sebesar \$4,9 miliar dari China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 (Cotterill, 2024).

Adapun perjanjian yang telah dibuat oleh Tiongkok dan Angola terkait penundaan pembayaran layanan utang dengan periode selama tiga tahun, penundaan pembayaran layanan utang pokok yang jatuh tempo pada tahun 2020 sampai dengan 2021 selama tujuh tahun setelah masa tenggang dengan sedikit keringanan pokok pada tahun 2024-2025, dan Angola memiliki sekitar \$1,5 miliar pada cadangan di rekening *escrow* di CDB dan akan menggunakannya untuk membayar bunga kepada CDB pada tahun 2020 sampai 2022.

Selain dengan Tiongkok, Angola juga mendapat penundaan pembayaran layanan utang dari Jepang dengan ditandatanganinya kesepakatan pada 3 Juni 2022 (Embassy of the

** World Bank. *External debt stocks, total (DOD, current US\$)-Somalia*.
<https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.CD?locations=SO>

Republic of Angola in Japan, 2022). Jepang Bersama dengan Kanada dan Amerika Serikat memberikan penundaan pembayaran layanan utang kepada Angola melalui *the Paris Club*, kelompok informal kreditor resmi yang mengambil peran dalam menemukan solusi terkoordinasi dan berkelanjutan untuk negara-negara yang mengalami kesulitan pembayaran utang (Secrétariat du Club de Paris, n.d). Jepang, Kanada dan Amerika Serikat menyetujui untuk memberikan perpanjangan kepada Angola atas penundaan pembayaran layanan utang yang jatuh tempo mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2021 (Secrétariat du Club de Paris, 2021).

Pemberian penundaan pembayaran layanan utang ini telah berhasil membuat Angola lepas dari resesi ekonomi. Salah satu indikator yakni dengan naiknya *credit rating* dari Angola di mana pada tahun 2020 mendapat nilai CCC dari Fitch Rating, naik menjadi B- pada tahun 2022 (Global Economy, 2024). Selain itu, Angola juga mendapat *credit rating* B- dari S&P dan BBB dari Moody's (Global Economy, 2024). Hal ini menandakan bahwa Angola telah terhindar dari kemungkinan negaranya menjadi *default* akibat tidak dapat membayarkan utangnya dan pemerintah Angola telah memiliki kelonggaran fiskal yang cukup besar.

Angola juga berhasil keluar dari resesi di tahun 2021 dan berlanjut hingga Q1 2022 dengan kenaikan PDB masing-masing sebesar 0,8 persen dan 2.6 persen (World Bank, 2022a). Kenaikan PDB ini ditopang oleh adanya kenaikan harga minyak dunia dan kinerja perdagangan yang kuat pada sektor perikanan, pertanian dan jasa (World Bank, 2022a). Pemerintah Angola juga menerapkan disiplin fiskal dengan mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu dan anggaran tahunan yang konservatif, didasarkan pada skenario terburuk untuk harga minyak dunia yang menurun (Lourenco, 2022). Keberhasilan ini dicapai Angola dengan melakukan berbagai kebijakan yang mendukung seperti simpanan sebagian besar pendapatan tak terduga dari kenaikan harga minyak serta tagihan bunga yang lebih rendah dengan adanya *debt reprofiling* dan penundaan pembayaran layanan utang membuat Angola surplus fiskal sebesar 2.2 persen dari PDB (International Monetary Fund, 2021). Sehingga, dapat dilihat bahwa penundaan pembayaran layanan utang telah memberikan dampak positif dan berhasil memberikan Angola ruang fiskal yang besar untuk memulihkan kondisi ekonominya saat pandemi maupun pasca pandemi Covid-19.

Penundaan Pembayaran Layanan Utang di Pakistan

Arab Saudi menjadi salah satu negara G20 yang menyetujui pemberian penundaan pembayaran layanan utang kepada Pakistan dengan jumlah yang terbesar. Pembayaran utang yang seharusnya dibayarkan selama *testing period* dari Mei 2020 hingga Desember 2021, kini akan dibayarkan kembali selama jangka waktu enam tahun, dimulai pada tahun 2022 dengan angsuran dua kali per tahun (Kundi, 2022). Penundaan pembayaran layanan utang ini memberikan ruang fiskal yang dibutuhkan oleh Pakistan untuk menangani kebutuhan kesehatan dan sosial ekonomi yang mendesak selama pandemi Covid-19 berlangsung. Total penundaan pembayaran layanan utang yang diberikan pemerintah Arab Saudi yakni sejumlah USD 846 juta (PakistanToday, 2022a)

Selain dengan Arab Saudi, Pakistan juga mendapatkan penundaan pembayaran layanan utang dari Jerman, di mana pada bulan September 2020, Bank Pembangunan Jerman atau KfW memberikan fasilitas penundaan pembayaran layanan utang tahap I sebesar 52,766

juta Euro (Dawn News, 2021). Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 2021, Bank Pembangunan Jerman dan Pemerintah Pakistan juga melakukan penandatanganan perjanjian layanan DSSI sebesar 26,213 juta Euro (Dawn News, 2021).

Pemerintah Jepang juga memberikan penundaan pembayaran layanan utang kepada Pakistan dengan total USD 730 juta (PakistanToday, 2022b). Pemerintah Jepang dan pemerintah Pakistan telah melakukan kesepakatan penundaan pembayaran layanan utang tahap pertama pada bulan April tahun 2021 dengan jumlah penundaan pembayaran layanan utang sebesar USD 370 juta, diikuti dengan penundaan pembayaran layanan utang tahap kedua pada bulan Oktober tahun 2021 sebesar USD 200 juta, dan tahap ketiga sebesar USD 160 juta. (PakistanToday, 2022b). Berdasarkan kesepakatan, pembayaran utang dan bunga yang jatuh tempo antara 1 Juli dan 31 Desember 2021 akan dijadwalkan ulang dan dapat dibayarkan oleh pemerintah Pakistan setelah tanggal 15 Juni 2023. Melalui penundaan pembayaran layanan utang ini, maka pemerintahan Pakistan dapat memperluas ruang fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi yang terkena dampak akibat terjadinya pandemi Covid-19 dan bencana banjir yang melanda Pakistan sejak bulan Juni 2022 (PakistanToday, 2022b). Selain penundaan pembayaran layanan utang, Pemerintah Jepang juga memutuskan untuk memberikan Bantuan Hibah Darurat (*Emergency Grant Aid*) sebesar USD 7 juta kepada Pakistan sebagai bentuk respon bantuan akibat kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh bencana banjir (PakistanToday, 2022b).

Amerika Serikat juga memberikan penundaan pembayaran layanan utang bagi Pakistan dengan total USD 128 juta (Masooma, 2020). Tujuan pemberian penundaan pembayaran layanan utang ini yakni agar Pakistan bisa mengalihkan sumber daya penting yang dimiliki untuk merespon dan dalam rangka pemulihan pandemi Covid-19 (Masooma, 2020). Selanjutnya, pasca bencana banjir yang menerpa Pakistan pada tahun 2022, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan perjanjian terkait pembayaran penundaan pembayaran layanan utang Pakistan di mana banjir dahsyat tersebut memperburuk krisis ekonomi Pakistan (Shahzad, 2022).

Korea Selatan berpartisipasi dalam memberikan penundaan pembayaran layanan utang Pakistan melalui penandatanganan perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023, dengan memberikan penundaan pembayaran utang sebesar USD 19,911 juta (The News International, 2023). Utang ini awalnya harus dibayarkan antara bulan Juli dan Desember 2021, namun melalui penundaan pembayaran layanan utang maka Pakistan dapat membayarkan utang tersebut selama jangka waktu enam tahun (termasuk masa tenggang satu tahun) dengan angsuran dua kali pertahun (The News International, 2023).

Dengan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang tinggi, Pakistan dapat menghemat sekitar 4,5 persen dari PDB setiap tahunnya melalui penundaan pembayaran layanan utang (Landers dan Aboneaaj, 2023). Meskipun telah mendapatkan kelonggaran fiskal, Pakistan nyatanya mengalami penurunan nilai *credit rating*, seperti *Fitch Rating* yang turun dari B- di tahun 2020 dan 2021 menjadi CCC+ pada tahun 2022 dan mencapai *rating* terendah CCC- pada Februari 2023 (Fitch Rating, 2024a). Pakistan juga mendapatkan penurunan *credit rating* dari Moody's yang semula BBB pada tahun 2015-2022 menjadi Caa3 pada Februari 2023 (Country Economy, n.d.). Pakistan juga mendapat *credit rating* CCC+ dari S&P (Phua dan Wood, 2024). Meskipun demikian, data pertumbuhan PDB negara Pakistan menggambarkan

peningkatan yang baik dibandingkan pada tahun 2020 yang mengalami penurunan 1,27 persen (Macrotrends, n.d.). PDB Pakistan meningkat pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing 6,51 persen dan 4,77 persen (Macrotrends, n.d.).

Perekonomian Pakistan tidak pulih dengan semestinya karena adanya kekacauan politik, banjir, dan pemadaman listrik nasional menyebabkan inflasi tahunan Pakistan mencapai 27,6% pada bulan Januari 2023, level tertinggi sejak tahun 1975 (Times of India, 2023). Selain pandemi Covid-19 dan permasalahan internal di Pakistan, perang Ukraina-Rusia, serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menciptakan guncangan sistemik yang mengganggu stabilitas ekonomi negara-negara berkembang termasuk Pakistan (Wedagedara, n.d). Nilai tukar rupee Pakistan anjlok dan dengan berkurangnya nilai tukar mata uang asing, Pakistan menghadapi krisis neraca pembayaran (Times of India, 2023). Serangkaian penundaan pembayaran layanan utang dan pemberian dana bantuan, pemerintah Pakistan dinilai masih memerlukan lebih banyak keringanan untuk mengatasi dampak pandemi yang masih ada pada perekonomian Pakistan (Ashfaq dan Bashir, 2020).

Penundaan Pembayaran Layanan Utang di Somalia

Somalia mendapatkan penundaan pembayaran layanan utang sebesar 99 persen utang dari Paris Club dikarenakan Somalia menjadi negara yang rapuh akibat konflik yang telah berlangsung selama tiga dekade sehingga membutuhkan sumber pembiayaan untuk melakukan pemulihan ekonomi (Ali, 2024). Selain mendapatkan kesepakatan penundaan pembayaran layanan utang dari Perancis, Inggris dan Amerika Serikat, negara Norwegia dan Jepang juga ikut andil dalam pemberian penundaan pembayaran layanan utang tersebut. Menurut Menteri Keuangan Somalia, H.E. Bihi Iman Egeh (Alashami, 2023):

“Melalui reformasi yang kami lakukan, kami telah secara konsisten meningkatkan pendapatan domestik, memperkuat pengelolaan keuangan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan operasi perbankan sentral, serta meningkatkan kapasitas lembaga nasional kami. Kami akan terus membangun keberhasilan ini di masa mendatang.”

Melalui penundaan pembayaran layanan utang ini maka pemerintah Somalia memastikan alokasi dana bisa digunakan untuk melakukan investasi yang signifikan dalam meningkatkan penyediaan layanan kesehatan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, meningkatkan anggaran kesehatan secara bertahap dari alokasi pra-Covid-19 sebesar 2 persen dengan tujuan mencapai 15 persen dari anggaran tahunan sesuai dengan Deklarasi Abuja (Amnesty International, 2021).

Melalui penundaan pembayaran layanan utang, Somalia mengurangi utang luar negeri dari 64% PDB pada tahun 2018 menjadi kurang dari 6% PDB pada akhir tahun 2023 (World Bank, 2024). Somalia mengalami pertumbuhan PDB sebesar 2,8 persen pada tahun 2023, naik dari 2,4 persen pada tahun 2022, didorong oleh peningkatan pasokan pada sektor pertanian (African Development Bank, 2024). Inflasi di Somalia juga mengalami penurunan

menjadi 6,0 persen pada tahun 2023, dari 6,8 persen pada tahun 2022 (African Development Bank, 2024). Penurunan inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh stabilitas rantai pasokan global yang didukung oleh perlambatan harga impor energi dan pangan.

Melalui penundaan pembayaran layanan utang, Somalia berhasil keluar dari krisis ekonomi. Prospek pertumbuhan jangka menengah dari Somalia akan tetap moderat, dengan pertumbuhan diproyeksikan sebesar 3,7 persen pada tahun 2024 dan 3,9 persen pada tahun 2025 -yang dipimpin oleh sektor pertanian dan peternakan yang pulih dengan cepat dari bencana kekeringan dan guncangan harga komoditas yang sempat melanda Somalia pada tahun 2022 (Rosauer, 2024).

Peran G20 Dalam pemulihan Ekonomi Pasca Covid - 19

G20 didirikan pada tahun 1999 setelah krisis keuangan Asia sebagai forum bagi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk membahas masalah ekonomi dan keuangan global. Seiring berjalannya waktu dan dibarengi oleh kondisi ekonomi dunia di mana terjadi krisis ekonomi dan keuangan global pada tahun 2007, dan, pada tahun 2009, sehingga G20 ditingkatkan menjadi kerja sama tingkat Kepala Negara/Pemerintahan setelah ditetapkan sebagai “forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional” (Ministry of External Affairs Government of India, n.d). Dengan adanya perubahan ini, dapat dilihat adanya konversi G20 sehingga memungkinkan G20 untuk menjalankan agenda, fungsi, dan dalam beberapa kasus, hubungan yang lebih dalam dengan aktor lain (Eccleston, Kellow and Carroll, 2015).

Kehadiran G20 menjadi sebuah keunggulan di mana G20 menyediakan representasi yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara/kreditur ekonomi berkembang sebagai salah satu mekanisme untuk menanggapi krisis ekonomi, khususnya di tahun 2008 (Eccleston, Kellow and Carroll, 2015). Selain itu, pada saat yang sama negara-negara dengan *power* besar belum mengambil peran yang komprehensif sebagai pengelola sistem global (Cooper, 2013). Sebaliknya, negara-negara dengan *power* besar memilih pendekatan selektif di mana negara-negara tersebut mengikuti beberapa inisiatif G20 dalam beberapa domain isu tertentu, namun akan menolak di domain isu lainnya atas dasar kepentingan nasional (Cooper, 2013).

G20 sebagai sebuah forum antarpemerintah tetap mengakar pada sejarahnya sebagai sebuah forum yang hadir sebagai respon atas kondisi ekonomi dan keuangan dunia yang tidak baik pasca krisis keuangan Asia. Dengan pandemi Covid-19 di mana menyebabkan perlambatan ekonomi, khususnya di negara-negara miskin (negara-negara yang paling rentan dan rapuh), maka para pemimpin G20 bertekad untuk mendukung negara-negara tersebut untuk bisa bertahan dengan memberikan penundaan pembayaran layanan utang terbatas waktu melalui skema DSSI. Dengan berpegang pada alasan/latar belakang pembentukannya, maka G20 sebagai sebuah rezim internasional memiliki prinsip yang tetap dipegang secara teguh.

Dalam menjalankan kebijakan terkait pemberian penundaan pembayaran layanan utang, maka G20 membuah *G20 Action Plan* tahun 2020 yang menetapkan prinsip-prinsip dan komitmen utama dari seluruh negara G20 untuk mendorong kerja sama ekonomi internasional dalam menghadapi krisis akibat adanya pandemi Covid-19 dan mengambil

berbagai langkah untuk mendukung pemulihan dan mencapai pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif (G20 Leaders' Declaration, 2020). Serangkaian *Action Plan* ini bisa dilihat pada publikasi yang diterbitkan oleh *G20 Development Working Group* ini sebagai bukti adanya prosedur dan aturan di mana dirincikan melalui serangkaian rencana kebijakan (G20 Development Working Group, 2021).

G20 bukan hanya mengajak negara anggotanya, namun juga mendesak kreditor sektor swasta untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini dengan ketentuan yang sebanding. Institut Keuangan Internasional (*The Institute of International Finance*) memimpin diskusi tentang partisipasi sukarela dalam skema DSSI (Nye dan Rhee, 2020). Institut Keuangan Internasional adalah asosiasi global untuk industri keuangan yang secara historis melayani *London Club*, sebuah komite informal kreditor komersial yang pada masa lalu merupakan sebuah komite yang kuat, berupaya membangun konsensus untuk merestrukturisasi pinjaman sindikasi kepada negara (Nye dan Rhee, 2020). Pada bulan November 2020, G20 menyadari bahwa penundaan pembayaran layanan utang tidak akan memadai bagi sejumlah negara, dan mengajukan Kerangka Kerja Bersama untuk Penanganan Utang (Common Framework for Debt Treatments) di luar DSSI. Kerangka kerja ini mengusulkan pengurangan tingkat utang secara keseluruhan berdasarkan kasus per kasus bagi negara-negara DSSI yang dianggap memiliki utang yang tidak berkelanjutan (Volz et al., 2020).

Selain itu, meningkatnya interdependensi dalam perekonomian membuat negara-negara G20 saling sepakat dan berkomitmen terkait kebijakan penundaan pembayaran layanan utang tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis dan kondisi keuangan global semakin ketat, di mana berdasarkan data pada kuartal I tahun 2020 menyebabkan penurunan GDP lebih dari 6 persen di negara-negara maju G-20 dan lebih dari 19 persen di negara-negara *emerging market* G-20 (International Monetary Fund, 2020). G20 juga melihat ketergantungan ekonomi makro melalui proses konsultasi dan diskusi bersama di antara negara-negara anggota (Derviş dan Kharas, 2016). Namun, tidak seperti IMF, di mana suara ditimbang berdasarkan kuota dan terdapat mekanisme pemungutan suara formal untuk mencapai keputusan, meskipun jarang digunakan, tidak ada anggota G-20 yang secara formal lebih penting daripada yang lain, atau dalam pengertian bahwa masing-masing negara anggota G20 semua "setara" (Derviş dan Kharas, 2016).

Bahwa secara umum diakui di mana kebijakan fiskal, moneter, dan nilai tukar yang diterapkan di suatu negara, terutama yang diambil oleh negara-negara besar, akan memiliki dampak terhadap negara lain (Derviş dan Kharas, 2016). Munculnya kekhawatiran atas kemungkinan adanya ketergantungan ekonomi makro menyebabkan G-20 mengambil komitmen untuk melakukan Proses Penilaian Bersama (Mutual Assessment Process) yang disepakati pada KTT Pittsburgh pada bulan September tahun 2009 untuk menjabarkan rencana masa depan negara-negara anggota G20 terkait kebijakan ekonomi makro di mana adanya penekanan pada efek *spillover* dari kebijakan ekonomi makro (Derviş dan Kharas, 2016). Dalam hal ini bisa dilihat bagaimana negara-negara G20 telah menyadari adanya saling ketergantungan dan keberkaitan khususnya dalam kebijakan makro ekonomi sehingga komitmen bersama menjadi bukti adanya interdependensi.

Semangat interdependensi ini juga tercermin secara eksplisit dalam deklarasi pemimpin negara-negara G20 dalam KTT di Riyadh (G20 Information Centre, 2020a):

“Para Pemimpin G20 bersatu dalam keyakinan bahwa tindakan global yang terkoordinasi, solidaritas, dan kerja sama multilateral lebih diperlukan saat ini daripada sebelumnya untuk mengatasi tantangan saat ini dan mewujudkan peluang abad ke-21 bagi semua orang dengan memberdayakan masyarakat, menjaga planet, dan membentuk batas-batas baru.”

Sehingga, dapat dilihat bagaimana rezim internasional, dalam hal ini G20, menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Meskipun dalam beberapa studi negara-negara anggota G20 dihadapkan pada penyeimbangan untuk mengejar kepentingan nasional namun tetap berkolaborasi untuk kepentingan bersama di tingkat global. Di satu sisi, G20 jelas berfokus pada penyelesaian konflik internal akibat adanya perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara anggota, namun di sisi lain, G20 semakin terbuka terhadap tanggung jawab untuk bekerja demi kebaikan bersama di tingkat global (Fues dan Messner, 2016). Dalam kaitannya dengan DSSI, maka bisa dilihat bagaimana negara-negara anggota G20 memilih untuk bekerja sama.

Kesimpulan

G20 sebagai sebuah rezim internasional berbentuk forum antarpemerintah berhasil mengkoordinasikan dukungan dari seluruh negara anggotanya yang bertujuan untuk merespon atas isu ekonomi global yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Program penundaan pembayaran layanan utang bagi negara-negara yang dikategorikan sebagai negara rentan dan rapuh, atau disebut dengan *Debt Service Suspension Initiative*, diberikan kepada negara-negara yang dianggap *eligilbe*. Angola, Pakistan dan Somalia merupakan tiga negara penerima penundaan pembayaran layanan utang terbesar melalui mekanisme DSSI yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia melalui G20. Angola dan Somalia mendapatkan keuntungan dari penundaan pembayaran layanan utang tersebut di mana perekonomian kedua negara menunjukkan perbaikan yang positif. Sedangkan, perekonomian Pakistan masih menunjukkan kinerja yang negatif dikarenakan kondisi internal yang secara langsung mempengaruhi.

G20 telah menerapkan prinsip dan nilai yang dipegangnya sejak awal mula dibentuk, yakni dalam forum yang hadir sebagai respon atas kondisi ekonomi dan keuangan dunia pasca terjadinya krisis keuangan Asia tahun 1998. G20 memiliki aturan dan prosedur yang berkaitan dengan pemberian penundaan pembayaran layanan utang melalui G20 Action Plan. G20 mengakui adanya interdependensi dalam kerangka makro ekonomi global, sehingga dirasa perlu untuk membuat kebijakan penundaan pembayaran layanan utang yang ditujukan bagi negara-negara yang masuk ke dalam kategori negara rentan dan rapuh. Hal ini sebagai upaya dari G20 bukan hanya untuk mewadahi kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya, namun sebagai bentuk respon dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat global.

Daftar Pustaka

- ADF. (2024). *As China Buys Less Oil, Angola Struggles to Repay Debt*. Africa Defense Forum. <https://adf-magazine.com/2024/09/as-china-buys-less-oil-angola-struggles-to-repay-debt/#:~:text=Since%202002%2C%20Angola%20has%20borrowed,owes%20Chinese%20lenders%20%2417%20billion.>
- African Development Bank. (2024). *Country Focus Report 2024 Somalia: Driving Somalia's Transformation, The Reform of the Global Financial Architecture*. <https://vcda.afdb.org/en/system/files/report/Somalia%20Final%202024.pdf>
- Alashami, A. (2023). *IMF and World Bank Announce US\$4.5 billion in Debt Relief for Somali*. International Monetary Fund. (Press Release). <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/12/13/pr23438-imf-and-world-bank-announce-us-4-5-billion-in-debt-relief-for-somalia>
- Ali, F. (2024). *Somalia has 99% of \$2bn debt cancelled in major boost to fragile recovery*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2024/mar/14/somalia-debt-cancelled-paris-club-creditor-nations-2bn>
- Amnesty International. (2021). *Somalia: Wholly inadequate Covid-19 response highlights need to use debt relief to invest in healthcare*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/somalia-wholly-inadequate-covid19-response-highlights-need-to-use-debt-relief-to-invest-in-health-care/>
- Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 106–126. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>
- Ashfaq, M. dan Bashir, M. (2020). Pakistan: making a "COVID budget" in a struggling economy. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 33(1), 69-77.
- Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 131. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.131-148.2020>
- Baleyte, J., Bourgeois, A., Favetto, B., Heam, J., Lequien, M., and Ralle, P. (2021). *The French economy in 2020: a year of upheal*. Institut national de la statistique et des etudes economiques. <https://www.insee.fr/en/statistiques/5395039>
- Bräutigam, D. A. dan Huang, Y. (2023). Integrating China into multilateral debt relief: Progress and problems in the G20 DSSI. Briefing Paper No. 09/2023. Washington DC: China-Africa Research Initiative, School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/271579/1/1847106269.pdf>
- Bureau of Economic Analysis. (2020). *Gross Domestic Product, 2nd Quarter 2020 (Second Estimate); Corporate Profits, 2nd Quarter 2020 (Preliminary Estimate)*. News Release. <https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-2nd-quarter-2020-second-estimate-corporate-profits-2nd-quarter>
- Cooper, A. F. (2013). Squeezed or revitalized? Middle powers, the G20 and the evolution of global governance. *Third World Quarterly*, 34(6), 963-984.
- Cotterill, J. (2024). *Angola setuju kesepakatan dengan bank pemerintah China untuk meringankan krisis utang*. Financial Times. <https://www.ft.com/content/7f29687d-d6eb-498c-97ba-774f617f0e0b>
- Country Economy. (n.d.) *Rating: Pakistan Credit Rating*. <https://countryeconomy.com/ratings/pakistan>
- Dawn News. (2021). *Pakistan, Germany sign treaty for 26.2m euro debt service suspension*.

<https://www.dawn.com/news/1654657/pakistan-germany-sign-treaty-for-262m-euro-debt-service-suspension>

- Derviş, K. dan Kharas, H. (2016). Macroeconomic Policy Interdependence and the G-20. Think Tank 20. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/g20_dervis_kharas.pdf
- Drezner, D. W. (2009). The Power and Peril of International Regime Complexity. *Perspectives on Politics*, 7(1), 65-70.
- Eccleston, R., Kellow, A., dan Carroll, P. (2015). G20 Endorsement in Post Crisis Global Governance: More Than a Toothless Talking Shop?. *The British Journal of Politics and International Relations*, 17(2), 298-317.
- Embassy of the Republic of Angola in Japan. (2022). *Exchange of Notes Regarding JICA's Credit Service Suspension Initiative and Susceptible Conditions*. <https://www.angola.or.jp/2022/06/04/exchange-of-notes-regarding-jicas-credit-service-suspension-initiative-and-susceptible-conditions/>
- Fitch Rating. (2024). *Angola*. <https://www.fitchratings.com/entity/angola-88085456#ratings>
- Fitch Rating. (2024a). *Pakistan*. <https://www.fitchratings.com/entity/pakistan-94558490>
- Fues, T. dan Messner, D. (2016). The G20: Balancing National Interests with the Global Common Good. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 2(3)
- G20 Development Working Group. (2021). *2020 Annual Update on G20 Development Commitments and G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://dwgg20.org/app/uploads/2021/10/Annual-Update.pdf>
- G20 Information Centre. (2020). *Extraordinary G20 Leader's Summit: Statement on COVID-19*. <https://g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-statement-0326.html>
- G20 Information Centre. (2020a). *Leaders' Declaration: Riyadh Summit*. <https://g20.utoronto.ca/2020/2020-g20-leaders-declaration-1121.html>
- G20 Leaders' Declaration. (2020). *Leaders' Declaration G20 Riyadh Summit*. https://www.consilium.europa.eu/media/46883/g20-riyadh-summit-leaders-declaration_en.pdf
- Global Economy. (2024). *Angola: Sovereign Credit Rating*. https://www.theglobaleconomy.com/Angola/credit_rating/
- Grigorian, D. A. dan Bhayana, A. (2024). *Zambia: A Case Study of Sovereign Debt Restructuring under the G20 Common Framework*. Working Paper 707. Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/sites/default/files/zambia-case-study-sovereign-debt-restructuring-under-g20-common-framework.pdf>
- Haggard, S. dan Simmons, B. A. (1987). Theories of International Regimes. *International Organization*, 41(3), 491-517.
- International Monetary Fund. (2020). *Implementation of the G-20 Action Plan*. <https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2020/071620a.pdf>
- International Monetary Fund. (2021). *Angola: Fifth Review Under the Extended Arrangement under the Extended Fund Facility and Request for Modifications of Performance Criteria -Press Release; Staff Report, and Statement by the Executive Director for Angola*. IMF Country Report No. 21/140.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020). *KTT G20 Bahas*

Upaya Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi.

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/666/ktt-g20-bahas-upaya-penanganan-pandemi-dan-pemulihan-ekonomi>

- Keohane, R. O. dan Nye, J. S. (2012). *Power and Interdependence (4th Ed.)*. Glenview, Illinois: Longman Pearson
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization*, 36(2), 185-205.
- Kundi, I. A. (2022). *Pakistan signs \$846m Debt Service Suspension Agreements under G-20 DSSI Framework*. The Nation. <https://www.nation.com.pk/04-Mar-2022/pakistan-signs-dollar-846m-debt-service-suspension-agreements-under-g-20-dssi-framework>
- Landers, C. dan Aboneaaj, R. (2023). *Debt Suspension Clauses to the Rescue?* Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/publication/debt-suspension-clauses-to-rescue>
- Larionova, M. dan Kirton, J. (2020). Global Governance After the COVID-19 Crisis. *International Organisations Research Journal*, 15(2), 7-17.
- Laskaridis, C. (2021). When push came to shove: COVID-19 and debt crises in low-income countries. *Canadian Journal of Development Studies*, 42(1-2), 200-220. <https://doi.org/10.1080/02255189.2021.1894102>
- Levy, M. A., Young, O. R. dan Zürn, M. (1995). The Study of International Regimes. *European Journal of International Relations*, 1(3).
- Lourenco, M. (2022). *Angola avoids a debt crisis, but is it out of the woods?* Control Risk. https://www.controlrisks.com/our-thinking/podcasts/in-focus-channel/angola-avoids-a-debt-crisis-but-is-it-out-of-the-woods?utm_referrer=https://www.google.com
- Macrotrends. (n.d.). *Pakistan GDP Growth Rate 1961-2024*. <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/PAK/pakistan/gdp-growth-rate>
- Masooma, S. (2020). *US Provides Debt Relief to Pakistan Under G-20's DSSI*. <https://propakistani.pk/2020/12/17/us-provides-debt-relief-to-pakistan-under-g-20s-dssi/>
- McKibbin, W. dan Vines D. (2020). Global macroeconomic cooperation in response to the COVID-19 pandemic: a roadmap for the G20 and the IMF. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(S1), S297-2337.
- Merling, L. dan Cashman, K. (2023). How Effective Was Assistance to the Vulnerable Countries During the Pandemic? Comparing the Debt Service Suspension Initiative and Special Drawing Rights. "Ovidius" *University Annals, Economic Sciences Series*, 23(1), 138-145.
- Ministry of External Affairs Government of India. (n.d.). *About G20*. <https://www.g20.in/en/about-g20/about-g20.html>
- Nye, A. dan Rhee, J. (2020). *The limits of the G20's debt service suspension initiative*. Yale School of Management. https://som.yale.edu/sites/default/files/2022-01/International_Institutions_The%20Limits%20of%20the%20G20%27s%20Debt%20Service%20Suspension%20Initiative.pdf
- Office for National Statistics. (2021). *GDP monthly estimate, UK: December 2020*. <https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestimateuk/december2020>

- PakistanToday. (2022a). *Pakistan, Saudi Fund for Development signs debt service suspension agreements worth \$846 million.*
<https://www.pakistantoday.com.pk/2022/03/03/pakistan-saudi-fund-for-development-signs-debt-service-suspension-agreements-worth-846-million/>
- PakistanToday. (2022b). *3rd phase of G20 DSSI: Japan defers another debt of \$160m.*
<https://www.pakistantoday.com.pk/2022/09/21/3rd-phase-of-g20-dssi-japan-defers-another-debt-of-160m/>
- Phua, Y. dan Wood, A. (2024). *Pakistan Ratings Affirmed at 'CCC+'; Outlook Stable.* S&P Global. <https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/type/HTML/id/3222256>
- Putra, A. D. (2022). *KTT G-20 tahun 2022.* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-jakarta5/baca-artikel/15644/KTT-G-20-tahun->
- Rosauer, V. (2024). *Somalia Economic Update 2024 | Edition No. 9: Addressing Climate Change Challenges for Economic Growth.* ReliefWeb. <https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-economic-update-june-2024-edition-no-9-addressing-climate-change-challenges-economic-growth>
- Secrétariat du Club de Paris. (2021). *The Republic of Angola Benefits from the Final Extension of the DSSI.* <https://clubdeparis.org/en/communications/press->
- Shahzad, A. (2022). *U.S. extends debt relief to Pakistan after floods.* Thomson Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-extends-debt-relief-pakistan-after-floods-2022-09-30/>
- Snape, D. and Spencer, L. (2003). *The Foundation of Qualitative Research.* Dalam Ritchie, J. and Lewis, J. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (1st Ed.) London: SAGE Publications
- Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines.* *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- The News International. (2023). *Pakistan, Korea sign \$19.9m debt service suspension accord.*
<https://www.thenews.com.pk/print/1070825-pakistan-korea-sign-19-9m-debt-service-suspension-accord>
- Times of India. (2023). *Explained: What happens if Pakistan defaults on its debt.*
<https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/explained-what-happens-if-pakistan-defaults-on-its-debt/articleshow/97704082.cms>
- Volz, U., Akhtar, S., Gallagher, K. P., Griffith-Jones, S., Hass, J., and Kraemer M. (2020). *Debt Relief for a Green and Inclusive Recovery: A Proposal.* Heinrich Böll Foundation, Center for Sustainable Finance SOAS University of London, Global Development Policy Center Boston University. <https://eprints.soas.ac.uk/34346/1/DRGR-report.pdf>
- Wedagedara, A. (n.d.). *South Asia in the New Global Debt Crisis - A Call for Collective Solutions.* Committee for the Abolition of Illegitimate Debt. <https://www.cadtm.org/South-Asia-in-the-New-Global-Debt-Crisis-A-Call-for-Collective-Solutions>
- Wikanto, E. (2020). *Daftar 10 negara masuk jurang resesi ekonomi akibat pandemi corona.* Kontan.co.id. <https://internasional.kontan.co.id/news/daftar-10-negara-masuk-jurang-resesi-ekonomi-akibat-pandemi-corona>
- World Bank. (2022). *Debt Service Suspension Initiative.* World Bank.

<https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative>

World Bank. (2022a). *Macro Poverty Outlook: Angola*.

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099926110132214008/pdf/IDU0433ca40c00d02045920b77e0fbc5442788c1.pdf>

World Bank. (2023). *GDP growth (annual %) - Germany*. World Development Indicators. World Bank Group.

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=DE&start=2017>

World Bank. (2023a). *GDP growth (annual %) - United Kingdom*. World Development Indicators. World Bank Group.

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=GB&start=2017>

World Bank. (2023b). *GDP growth (annual %) - France*. World Development Indicators. World Bank Group.

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2023&locations=FR&start=2017>

World Bank. (2024). *Reforms and relief: How Somalia turned a page amid a global debt crisis*.

World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2024/04/24/reforms-and-relief-how-somalia-turned-a-page-amid-a-global-debt-crisis>

World Health Organization. (2021). *G20 leaders boost support of the Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator but urgent and immediate action is needed to maintain momentum*.

[https://www.who.int/news/item/21-05-2021-g20-leaders-boost-support-of-the-access-to-covid-19-tools-\(act\)-accelerator-but-urgent-and-immediate-action-is-needed-to-maintain-momentum](https://www.who.int/news/item/21-05-2021-g20-leaders-boost-support-of-the-access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator-but-urgent-and-immediate-action-is-needed-to-maintain-momentum)